

BAB I

PENDAHULUAN

I.1. Latar Belakang

Pembangunan Kabupaten Sidenreng Rappang merupakan bagian integral dari Pembangunan Nasional dan Regional Provinsi Sulawesi Selatan. Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi merupakan salah satu Perangkat Daerah (PD) Kabupaten Sidenreng Rappang yang melaksanakan Program dan Kegiatan dalam Pengembangan Ekonomi Kerakyatan dalam pelaksanaannya tidak terlepas dari koridor kebijakan renstra yang saling berintegrasi satu dengan lainnya. Oleh karena itu suatu Kewajiban Perangkat Daerah (PD) dalam mewujudkan Visi, Misi, Program dan kemudian ditindaklanjuti pada Kegiatan yang dilaksanakan oleh setiap Perangkat Daerah (PD).

Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi merupakan Satuan Perangkat Daerah sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Sidenreng Rappang Nomor 55 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Sidenreng Rappang Nomor 48 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas, dan Tata Kerja Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi sebagai perangkat otonomi daerah yang mempunyai visi dan misi sesuai kompetensi yang dimiliki serta koheren dengan visi misi Kabupaten Sidenreng Rappang. Untuk melaksanakan visi dan misi sebagaimana yang telah dituangkan dalam rencana kerja (Renja) yang dilaksanakan pada setiap tahunnya dalam rangka mengukur kinerja Organisasi dan sebagai tindaklanjut penjabaran dari Rencana Strategis Jangka Menengah (Lima Tahunan) yang capaian kinerjanya diukur setiap tahun melalui Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Rencana kerja PD ditindaklanjuti dalam dokumen Rencana Kerja Pembangunan Daerah setiap tahunnya dan selanjutnya diproses dalam penyusunan RAPBD.

Target kinerja Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi Tahun 2025 ini, menunjukkan nilai kuantitatif yang melekat pada setiap indikator kinerja unit satuan kerja Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi baik pada tingkat kegiatan dan merupakan pembanding bagi proses pengukuran kinerja/keberhasilan unit Satuan Kerja Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi yang dilakukan pada setiap akhir tahun kinerja.

Sedangkan Rencana Kinerja pada Tahun 2026 bagi Unit Satuan Kerja Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi merupakan komitmen dan kontrak kerja yang harus dioptimalkan dalam proses pencapaian kinerjanya, sebagai bagian dari upaya pencapaian target kinerja, Rencana Strategis Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi Kabupaten Sidenreng Rappang pada Umumnya.

Dalam perkembangannya rencana kinerja yang telah disusun tidak tertutup kemungkinan untuk dilakukan perubahan. Perubahan ini dimaksudkan untuk menjaga konsistensi antara perencanaan dan penganggaran.

I.2. Landasan Hukum

Pelaksanaan Perubahan Rencana Kerja (Renja) yang dilaksanakan oleh setiap Perangkat Daerah (PD) khususnya lingkup Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang telah diatur dalam peraturan Perundang-undangan sebagaimana tersebut di bawah ini :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 143 Tahun 2024 tentang Kabupaten Sidenreng Rappang di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 329, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7080);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah tahun 2026 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 435);
8. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 3 Tahun 2022 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2022-2041 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2022 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 322);

9. Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 7 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2024 Nomor 7);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2024 Nomor 5);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 5 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2012-2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 26);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 5 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 5);
13. Peraturan Bupati Sidenreng Rappang nomor tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2026

I.3. Maksud dan Tujuan

Penyusunan Rencana Kerja (Renja) pada setiap Perangkat Daerah (PD), dimaksudkan untuk mengevaluasi pelaksanaan dalam tahun berjalan yang menunjukkan adanya ketidaksesuaian perkembangan keadaan.

I.4. Sistematika Penulisan

BABI P E N D A H U L U A N

I.1. Latar Belakang

I.2. Landasan Hukum

I.3. Maksud dan Tujuan

I.4. Sistimatika Penulisan

BAB II HASIL EVALUASI PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

- 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah
- 2.2. Analisa Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah
- 2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD
- 2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

- 3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional
- 3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

- 4.1 Program dan Kegiatan

BAB V P E N U T U P

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

II.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu

Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD tahun 2025 sebagai bahan pembandingan pada pelaksanaan Renja tahun 2024, dimana pada tahun 2024 pelaksanaan Renja PD capaian prosentasenya sekitar 97,85 persen dan berdasarkan realisasi tersebut maka dapat dikatakan bahwa pencapaian yang optimal atau serapan anggaran cukup optimal. Untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi seyogyanya ditempuh langkah-langkah strategis yakni dengan memberikan arahan dan petunjuk serta memotivasi SDM agar dapat memacu serapan anggaran sesuai dengan program dan kegiatan.

Disamping itu adanya penyesuaian program berdasarkan Renstra yang telah ditetapkan sebagai acuan dalam menyusun program pada Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi Kabupaten Sidenreng Rappang diharapkan dapat meningkatkan capaian prosentase pelaksanaan Renja PD pada tahun 2026. Sebagai bahan evaluasi dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel T-C.29

REKAPITULASI EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA DAN PENCAPAIAN RENSTRA DINAS KOPERASI, UKM, TENAGA KERJA, DAN TRANSMIGRASI KABUPATEN SIDENRENG RAPPANBG s.d. TAHUN 2025
PEMERINTAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)/Sub Kegiatan	Target kinerja capaian Renstra Tahun 2029 (akhir periode renstra)	Realisasi target kinerja hasil program dan keluaran kegiatan s.d. dengan tahun 2024	Target dan realisasi kinerja program dan kegiatan tahun lalu (2024)			Target Program/Kegiatan/Sub Kegiatan tahun berjalan (2025)	Perkiraan realisasi capaian target Renstra PD s.d. tahun berjalan (2025)	
					Target Renja PD tahun 2024	Realisasi Renja PD tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian	Tingkat Capaian(%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10	11
	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	Persentase peningkatan koperasi yang berkualitas	8,20	7	7	7	100,0%	7,30	7	85,37%
	Kegiatan Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase koperasi yang diawasi	85,00	73,68	73,68	73,68	100,0%	75,00	73,68	86,68%

	Pelaksanaan Proses Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Koperasi yang Telah Dilakukan Pengawasan Kekuatan, Kesehatan, Kemandirian, Ketangguhan, serta Akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	113,00	158	20	20	100,0%	13,00	158	139,82%
	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	Persentase koperasi aktif	69,50	68,42	68,42	68,42	100,0%	68,45	68,42	98,45%
	Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Kegiatan Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase anggota koperasi yang dilatih	7,40	6,67	6,67	6,67	100,0%	6,67	6,67	90,14%
	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Sub keg Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian	193,00	45	20	20	100,0%	8,00	45	23,32%
	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	Meningkatnya Koperasi Yang Berkualitas	30,00	22,81	22,81	22,81	100,0%	22,85	22,81	76,03%

	Kegiatan Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Koperasi Yang Diberikan Dukungan Fasilitas Pendampingan Kelembagaan Dan Usaha Untuk Koperasi Dengan Wilayah Keanggotaan Dalam Daerah Kab.	82,00	73,68	73,68	73,68	100,0%	75,00	73,68	89,85%
	Sub kegiatan Pembinaan dan Pendampingan Bagi Keluarga dan Kelompok Masyarakat yang Akan Membentuk Koperasi Dalam Pengembangan Ekonomi	Pembinaan dan atau pendampingan yang dilaksanakan	267,00	0	-	-	#DIV/0!	11,00	0	0,00%
	Sub kegiatan Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, PenataanManajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha	Jumlah unit usaha yg produktif, bernilai tambah, memiliki akses pasar, akses pembiayaan, penguatan kelembagaan, penataan maajemen, standarisasi dan restrukturisasi usaha	105,00	0	-	-	#DIV/0!	5,00	0	0,00%
	Sub kegiatan Pemberdayaan Koperasi dengan Keanggotaan Daerah Kabupaten/Kota	Koperasi dengan keanggotaan daerah kab/kota	40,00	0	-	-	#DIV/0!	0,00	0	0,00%
	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA	Persentase usaha mikro yang menjadi wirausaha	26,00	16,53	16,53	16,53	100,0%	17,00	16,53	63,58%

	MIKRO (UMKM)									
	Kegiatan Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	Persentase usaha mikro yang diberdayakan	3,50	1,2	1,2	1,2	100,0%	1,25	1,2	34,29%
	Sub keg Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Jumlah Unit Usaha yang Telah Menerima Pembinaan dan Pendampingan Terhadap Usaha Mikro	1.547,00	337	10	10	100,0%	10,00	337	21,78%
	Sub keg Penyusunan Basis Data Usaha Mikro	Jumlah unit usaha mikro terdata	800,00	0	0	0	#DIV/0!	0,00	0	0,00%
	Sub keg Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UMKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UMKM dan Kewirausahaan melalui Pendidikan dan Pelatihan	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Usaha Mikro dan Kewirausahaan	516,00	266	266	266	100,0%	50,00	266	51,55%
	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	Persentase usaha mikro yang meningkat volume usahanya setelah difasilitasi pengembangan	5,00	2,5	2,5	2,5	100,0%	3,00	2,5	50,00%

Kegiatan Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	Persentase usaha mikro yang difasilitasi pengembangan	2,50	2	2	2	100,0%	2,00	2	80,00%
Sub keg Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi	Jumlah Unit Usaha Mikro yang Terfasilitasi dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi	394,00	294	96	96	100,0%	20,00	294	74,62%
PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA	Persentase Kegiatan Yang Dilaksanakan Yang Mengacu Ke Rencana Tenaga Kerja	100,00	0	-	-	#DIV/0!	0,00	0	0,00%
Kegiatan Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)	Dokumen perencanaan tenaga kerja kabupaten	ada	tidak ada	tidak ada	tidak ada	0,0%	tidak ada	0	0,00%
Sub kegiatan Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro	Jumlah dokumen tenaga kerja makro	1,00	0	-	-	0,0%	0,00	0	0,00%
PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Persentase tenaga kerja bersertifikat kompetensi	36,00	30	30	30	100,0%	31,00	30	83,33%
Kegiatan Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	Persentase pelaksanaan pelatihan	55,00	49	49	49	100,0%	50,00	49	89,09%

	Sub keg Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun n	4.425,00	565	565	565	100,0%	670,00	565	12,77%
	Sub Keg. Pengadaan Sarana Pelatihan Kerja Kabupaten/Kota	Jumlah Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana Pelatihan Kerja	101,00	6	6	6	100,0%	55,00	0	0,00%
	Kegiatan Pemninaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Persentase Lembaga Pelatihan Swasta yang dibina	10,70	10,2	10,2	10,2	100,0%	10,30	10,2	95,33%
	Sub Kegiatan Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Jumlah Lembaga Pelatihan Swasta yang dibina	13,00	8	8	8	100,0%	1,00	8	61,54%
	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Persentase Tenaga Kerja Yang Ditempatkan (Dalam Dan Luar Negeri) Melalui Mekanisme Layanan Antar Kerja Dalam Wilayah Kab.	60,00	16,32	16,32	16,32	100,0%	16,50	16,32	27,20%
	Kegiatan Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	Jumlah penempatan tenaga kerja melalui pasar kerja online	385,00	28	28	28	100,0%	30,00	28	7,27%
	Sub kegiatan Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online	Jumlah pencari dan pemberi kerja yang terdaftar dalam pasar kerja melalui sistem online (Karir Hub)	250,00	0	-	-	#DIV/0!	0,00	0	0,00%

Kegiatan Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah layanan terpadu satu atap (LTSA) yang dibantu	1,00	0	-	-	#DIV/0!	0,00	0	0,00%
Sub kegiatan Penyediaan Layanan Terpadu pada Calon Pekerja Migran	Jumlah CPMI yang terlayani sesuai prosedur dalam LTSA dan PMI bermasalah yang ditangani	50,00	0	-	-	#DIV/0!	0,00	0	0,00%
PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	Persentase perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar BPJS Ketenagakerjaan)	50,00	16,32	16,32	16,32	100,0%	4,50	16,32	32,64%
Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang Hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Besaran pemeriksaan perusahaan	25,00	13,61	13,61	13,61	100,0%	13,62	13,61	54,44%
Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan	Jumlah Data dan Informasi Sarana HI (PP/PKB, Struktur Skala Upah, dan LKS Bipartit) dan Pekerja yang Terdaftar sebagai Peserta Jamsostek serta Pengupahan	128,00	30	10	10	100,0%	3,00	30	23,44%

	Kegiatan Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	Besaran Pekerja/Buruh Yang Menjadi Peserta Program Jamsostek	30,00	16,95	16,95	16,95	100,0%	20,00	16,95	56,50%
	Sub keg Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	Terlaksananya Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	11.228,00	8976	8976	8976	100,0%	9595,00	9500	84,61%
	PROGRAM PERENCANAAN KAWASAN TRANSMIGRASI	Persentase perencanaan kawasan transmigrasi	20,00	0	0	0	#DIV/0!	0,00	0	0,00%
	Kegiatan Perencanaan Kawasan Transmigrasi	Jumlah dokumen perencanaan untuk kawasan transmigrasi	4,00	0	0	0	#DIV/0!	0,00	0	0,00%
	Sub kegiatan Identifikasi Potensi Kawasan Transmigrasi	Jumlah dokumen hasil identifikasi potensi kawasan transmigrasi yang bisa dibangun dan dikerjasamakan dengan daerah lain	4,00	0	0	0	#DIV/0!	0,00	0	0,00%
	PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI	Persentase fasilitasi pembangunan kawasan transmigrasi	100,00	100,0	100,0	100,0	100,0%	100,00		0,00%

	Kegiatan Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah KK yang difasilitasi penempatannya	260,00	0	-	-	#DIV/0!	0,00	0	0,00%
	Sub kegiatan Pemindahan dan Penempatan Transmigran yang Berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah transmigran yang dipindahkan dan ditempatkan	260,00	0	-	-	#DIV/0!	0,00	0	0,00%
	sub keg Penyuluhan Transmigrasi	Jumlah Calon Transmigran yang Mendapatkan Penyuluhan	50,00	30	30	30	100,0%	30,00	30,00	60,00%
	sub keg Pelatihan transmigrasi	Jumlah Calon Transmigran dan/atau Transmigran yang Mendapatkan Pelatihan	60,00	40	40	40	100,0%	40,00	40,00	66,67%
	PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI	Persentase kawasan transmigrasi yg dikembangkan	100,00	100	100,0	100,0	100,0%	100,00	100	100,00%
	Kegiatan Pengembangan Satuan Pemukiman pada tahap Kemandirian	Jumlah Satuan Permukiman yang dibina	4,00	4	-	-		4,00	0	0,00%
	Sub keg Penguatan SDM dalam rangka Kemandirian Satuan Pemukiman	Jumlah Kepala Keluarga Transmigran yang Dibina	80,00	0	-	-	#DIV/0!	20,00	0	0,00%

	Sub keg Penguatan Infrastruktur Sosial, Ekonomi dan Kelembagaan dalam rangka Kemandirian Satuan Permukiman	Jumlah Satuan Permukiman yang Dikembangkan dalam rangka Penguatan Infrastruktur Sosial, Ekonomi dan Kelembagaan	1,00	0	-	-	0,0%	1,00	-	0,00%
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100,00	100	100	100	100,0%	100,00	100	100,00%
	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Cakupan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100,00	100	100	100	100,0%	100,00	100	100,00%
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	18,00	3	3	3	100,0%	3,00	3	16,67%
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	18,00	3	3	3	100,0%	3,00	3	16,67%
	Kegiatan: Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Cakupan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100,00	100	100	100	100,0%	100,00	100	100,00%
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	2.772,00	462	462	462	100,0%	462,00	462	16,67%
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1.050,00	200	200	200	100,0%	150,00	200	19,05%

	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	102,00	17	17	17	100,0%	17,00	17	16,67%
	Kegiatan: Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Cakupan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100,00	100	100	100	100,0%	100,00	100	100,00%
	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen hasil koordinasi dan pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	168,00	28	28	28	100,0%	28,00	28	16,67%
	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	173,00	33	33	33	100,0%	28,00	33	19,08%
	Kegiatan:Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100,00	100	100	100	100,0%	100,00	100	100,00%
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	62,00	12	12	12	100,0%	10,00	12	19,35%
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	2.236,00	246	246	246	100,0%	398,00	246	11,00%

	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	471,00	67	67	67	100,0%	45,00	67	14,23%
	Kegiatan: Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Cakupan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100,00	100	100	100	100,0%	100,00	100	100,00%
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	17,00	3	3	3	100,0%	2,00	1	5,88%
	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	11,00	1	1	1	100,0%	2,00	1	9,09%
	Kegiatan: Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan	Cakupan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan	100,00	100	100	100	100,0%	100,00	100	100,00%
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	72,00	12	12	12	100,0%	12,00	12	16,67%
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	72,00	12	12	12	100,0%	12,00	12	16,67%
	Kegiatan: Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100,00	100	100	100	100,0%	100,00	100	100,00%

Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	72,00	12	12	12	100,0%	12,00	12	16,67%
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	74,00	19	19	19	100,0%	11,00	19	25,68%
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	6,00	1	1	1	100,0%	1,00	1	16,67%

II.2. Analisa Kinerja Pelayanan SKPD

Secara kelembagaan Perangkat Daerah (PD) Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi Kabupaten Sidenreng Rappang yang terbentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah berkedudukan sebagai unsur pelaksana Otonomi Daerah. Untuk mengukur Kinerja Pelayanan PD, maka dapat dilakukan dengan mengimplementasikan metode Analisa Lingkungan Strategis, Analisa Lingkungan Internal dan Analisa Lingkungan Eksternal dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta kewenangan yang diamanatkan oleh lembaga Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi Kabupaten Sidenreng Rappang.

Dalam menentukan tolok ukur kinerja dan indikator kinerja pelayanan masing-masing sesuai tugas pokok dan fungsi serta norma dan standar pelayanan PD, memerlukan :

II.2.1. Lingkungan Strategis

Pengertian Lingkungan Strategis adalah faktor yang berpengaruh baik langsung maupun tidak langsung terhadap kinerja Organisasi Unit Satuan Kerja Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi, Lingkungan Strategis dibagi dua yaitu Instrumental Input dan Environmental Input. Environmental Input berkaitan dengan kebijakan atau Political Will dan faktor eksternal yang merupakan faktor yang tidak dapat diubah melainkan disiasati apabila berbentuk ancaman. Demikian pula dengan lingkungan strategis dianalisis berdasarkan instrumental serta environmental input.

II.2.2. Analisa Lingkungan Internal

Lingkungan Internal merupakan Variabel lingkungan yang berpengaruh terhadap peningkatan pelayanan kinerja pada Unit Satuan Kerja Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi Kabupaten Sidenreng Rappang yang dalam batas-batas tertentu yang dapat

dikendalikan dalam rangka mewujudkan tujuan/sasaran Satuan Kerja Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi.

Selain itu, tersedianya Sumber Daya Manusia/Aparatur serta Sumber Daya Material berupa sarana dan prasarana kerja yang dimiliki Satuan Kerja Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi saat ini, meskipun masih jauh memadai, namun tugas-tugas dapat dilaksanakan dengan dukungan dan motivasi kerja aparatur yang bertugas pada Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi.

II.2.3. Analisa Lingkungan Eksternal

Lingkungan Eksternal Satuan Kerja Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi Kabupaten Sidenreng Rappang, adalah salah satu Variabel yang turut mempengaruhi optimalisasi pencapaian kinerja aparatur, akan tetapi pengelolaan atau pengendaliannya diluar kendali Unit Satuan Kerja Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi, jika faktor lingkungan eksternal ini mempunyai pengaruh atau berdampak negatif terhadap optimalisasi pencapaian kinerja aparatur maka harus dapat disiasati dalam rangka mendukung kelancaran dan meningkatkan kinerja unit Satuan Kerja Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi Kabupaten Sidenreng Rappang.

Khususnya dalam penyelenggaraan Pemerintahan, Pembangunan dan Pembinaan kemasyarakatan di Kabupaten Sidenreng Rappang pada umumnya, terutama yang berkaitan dengan cara menyikapi desentralisasi kewenangan dalam hal pembinaan dan pengembangan di bidang Koperasi, UKM, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi serta hubungan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang dalam hal Pembangunan dan secara umum dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel T-C30
 PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN DINAS KOPERASI, UKM, TENAGA KERJA, DAN TRANSMIGRASI
 KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG

No	Indikator	SPM/ Standar Nasional	IKK	Target Renstra SKPD						Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2027	Tahun 2028	Tahun 2029	Tahun 2030	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2027	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	BIDANG KOPERASI													
1	Persentase peningkatan koperasi yang berkualitas		□	7,3	7,5	7,7	8	8,2	8,5	7	0	7,5	7,7	
2	Persentase koperasi yang diawasi			75	78	80	83	85	87,00	73,68	0	78	80	
3	Jumlah Koperasi yang Telah Dilakukan Pengawasan Kekuatan, Kesehatan, Kemandirian, Ketangguhan, serta Akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota			13	30	30	40	45	50	20	0	30	30	
4	Persentase koperasi aktif		□	68,45	68,5	68,7	69	69,5	70	68,42	0	68,5	68,7	

5	Persentase anggota koperasi yang dilatih			6,67	6,69	7	7,2	7,4	7,7	6,67	0	6,69	7
6	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian			8	20	30	40	50	70	45	0	20	30
	Meningkatnya Koperasi Yang Berkualitas			22,85	23,2	25	27	30	33	22,81	0	23,2	25
7	Persentase Koperasi Yang Diberikan Dukungan Fasilitas Pendampingan Kelembagaan Dan Usaha Untuk Koperasi Dengan Wilayah Keanggotaan Dalam Daerah Kab.		<input type="checkbox"/>	73,68	75	77	80	82	85	73,68	0	75	77
8	Pembinaan dan atau pendampingan yang dilaksanakan		<input type="checkbox"/>	11	106	50	50	50	50,00	50	0	106	50
9	Jumlah unit usaha yg produktif, bernilai tambah, memiliki akses pasar, akses pembiayaan, penguatan kelembagaan, penataan maajemen, standarisasi dan restrukturisasi			5	25	25	25	25	25	0	0	25	25

	usaha													
10	Koperasi dengan keanggotaan daerah kab/kota			0	10	10	10	10	10	0	0	10	10	
11	Persentase usaha mikro yang menjadi wirausaha		□	17	20	22	24	26	28	16,53	0	20	22	
12	Persentase usaha mikro yang diberdayakan			1,25	2	2,5	3	3,5	4	1,2	0	2	2,5	
13	Jumlah Unit Usaha yang Telah Menerima Pembinaan dan Pendampingan Terhadap Usaha Mikro			10	300	300	300	300	300	337	0	300	300	
	Jumlah unit usaha mikro terdata			0	200	200	200	200	200	0	0	200	200	
14	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Usaha Mikro dan Kewirausahaan		□	50	50	50	50	50	50	266	0	50	50	
15	Persentase usaha mikro yang meningkat volume usahanya setelah difasilitasi			3	3,5	4	4,5	5	5,5	2,5	0	0	0	

	pengembangan													
16	Persentase usaha mikro yang difasilitasi pengembangan			2	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2	0	2,5	2,5	
17	Jumlah Unit Usaha Mikro yang Terfasilitasi dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi			20	20	20	20	20	20	294	0	20	20	
18	Persentase Kegiatan Yang Dilaksanakan Yang Mengacu Ke Rencana Tenaga Kerja			0	100	100	100	100	100	0	0	100	100	
19	Dokumen perencanaan tenaga kerja kabupaten			tidak ada	ada	ada	ada	ada	ada	tidak ada	tidak ada	ada	ada	
20	Jumlah dokumen tenaga kerja makro		<input type="checkbox"/>	0	1	1	1	1	1	0	0	1	1	
21	Persentase tenaga kerja bersertifikat kompetensi			31	32	33	34	35	36	30	0	32	33	
22	Persentase pelaksanaan pelatihan			50	51	52	53	54	55	49	0	51	52	

23	Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun n			670	790	800	800	800	800	565	0	790	800
24	Jumlah Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana Pelatihan Kerja			55	10	10	10	10	10	6	0	10	10
	Persentase Lembaga Pelatihan Swasta yang dibina			10,3	10,4	10,5	10,6	10,7	10,8	10,2	0	10	0
25	Jumlah Lembaga Pelatihan Swasta yang dibina	<input type="checkbox"/>		1	1	1	1	1	1	8	0	1	1
	Persentase Tenaga Kerja Yang Ditempatkan (Dalam Dan Luar Negeri) Melalui Mekanisme Layanan Antar Kerja Dalam Wilayah Kab.	<input type="checkbox"/>		16,5	18	25	35	50	60	16,32	0	18	25
	Jumlah penempatan tenaga kerja melalui pasar kerja online	<input type="checkbox"/>		30	35	50	70	90	110	28	0	35	50
	Jumlah pencari dan pemberi kerja yang terdaftar dalam pasar kerja melalui sistem online (Karir Hub)	<input type="checkbox"/>		0	50	50	50	50	50	0	0	50	50

	Jumlah layanan terpadu satu atap (LTSA) yang dibantu	<input type="checkbox"/>	0	1	1	1	1	1	0	0	1	1
	Jumlah CPMI yang terlayani sesuai prosedur dalam LTSA dan PMI bermasalah yang ditangani	<input type="checkbox"/>	0	10	10	10	10	10	0	0	10	10
26	Persentase perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar BPJS Ketenagakerjaan)		15	17	20	25	30	40	13,75	0	17	20
27	Besaran pemeriksaan perusahaan		13,62	13,63	15	17	20	25	13,61	0	13,63	15
28	Jumlah Data dan Informasi Sarana HI (PP/PKB, Struktur Skala Upah, dan LKS Bipartit) dan Pekerja yang Terdaftar sebagai Peserta Jamsostek serta Pengupahan		3	20	20	25	30	40	30	0	20	20
29	Besaran Pekerja/Buruh Yang Menjadi Peserta		20	22	25	27	30	33	16,95	0	22	25

	Program Jamsostek													
30	Terlaksananya Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	<input type="checkbox"/>	9595	10000	10328	10628	11228	11.500	8976	0	10000	10328		
31	Persentase perencanaan kawasan transmigrasi		0	13	15	17	20	25	0	0	13	15		
32	Jumlah dokumen perencanaan untuk kawasan transmigrasi		0	3	4	4	4	5	0	0	3	4		
	Jumlah dokumen hasil identifikasi potensi kawasan transmigrasi yang bisa dibangun dan dikerjasamakan dengan daerah lain		0	3	4	4	4	5	0	0	3	4		
33	Persentase fasilitasi pembangunan kawasan transmigrasi	<input type="checkbox"/>	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100		
34	Jumlah KK yang difasilitasi penempatannya		-	50	70	70	70	80	0	0	50	70		
35	Jumlah transmigran yang dipindahkan dan ditempatkan		-	50	70	70	70	80	0	0	50	70		

36	Jumlah Calon Transmigran yang Mendapatkan Penyuluhan			20	0	0	0	0	0	30	20	0	0
37	Jumlah Calon Transmigran dan/atau Transmigran yang Mendapatkan Pelatihan			20	0	0	0	0	0	40	20	0	0
38	Persentase kawasan transmigrasi yg dikembangkan			100	100	100	100	100	100	100	-	100	100
39	Jumlah Satuan Permukiman yang dibina			4	4	4	4	4	4	4	0	4	4
40	Jumlah Kepala Keluarga Transmigran yang Dibina			-	20	20	20	20	20	-	-	20	20
41	Jumlah Satuan Permukiman yang Dikembangkan dalam rangka Penguatan Infrastruktur Sosial, Ekonomi dan Kelembagaan			1	1	1	1	1	1	0	0	1	1
42	Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			100	100	100	100	100	100	100	50	100	100

43	Cakupan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			100	100	100	100	100	100	100	50	100	100	
44	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			3	3	3	3	3	3	3	1	3	3	
45	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			3	3	3	3	3	3	3	1	3	3	
46	Cakupan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			100	100	100	100	100	100	100	50	100	100	
47	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN			462	462	462	462	462	462	462	462	462	462	
48	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD			150	175	175	175	175	175	200	79	175	175	
49	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan / Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD			17	17	17	17	17	17	17	6	17	17	

50	Cakupan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			100	100	100	100	100	100	100	50	100	100	
51	Jumlah Dokumen hasil koordinasi dan pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian			28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	
52	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai			28	28	28	28	28	28	33	28	28	28	
53	Cakupan Administrasi Umum Perangkat Daerah			100	100	100	100	100	100	100	50	100	100	
54	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan			10	10	10	10	10	10	12	-	10	10	
55	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu			398	398	398	398	398	398	246	0	398	398	
56	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			45	45	45	45	45	45	67	0	45	45	
57	Cakupan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			100	100	100	100	100	100	100	50	100	100	

58	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan			3	3	3	3	3	3	3	0	3	3	
59	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan			2	2	2	2	2	2	2	0	2	2	
60	Cakupan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan			100	100	100	100	100	100	100	50	100	100	
61	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan			12	12	12	12	12	12	12	6	12	12	
62	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan			12	12	12	12	12	12	12	6	12	12	
63	Cakupan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			100	100	100	100	100	100	100	50	100	100	
64	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya			12	12	12	12	12	12	12	5	12	12	
65	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya			11	11	11	11	11	11	19	3	11	11	

	yang Dipelihara													
66	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi			1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1

II.3. Isu-Isu Penting Tugas dan Fungsi SKPD

Untuk merumuskan isu-isu strategis dalam memproyeksikan kondisi yang diharapkan kedepan dalam kaitannya dengan bidang tugas Unit Satuan Kerja Dinas Koperasi UKM, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi Kabupaten Sidenreng Rappang dilakukan dengan mengimplementasikan metode analisis SWOT (Streng, Weakness, Opportunities dan Thtreats). Isu tersebut akan memiliki arti fungsional apabila dibahas dalam kaitannya dengan kondisi realitas Organisasi. Isu penting yang berkaitan penyelenggaraan Tugas dan Fungsi PD merupakan kenyataan yang menggambarkan keadaan atau realitas tentang sebuah pokok permasalahan, agar memudahkan dalam mengorganisir isu, maka dilakukan identifikasi. Hasil identifikasi isu dapat diuraikan seperti tabel di bawah ini ;

Matriks Internal Strategi Faktor Analisis Sistem

Kekuatan (S)	Kelemahan (W)
➤ Adanya Peraturan Bupati Sidenreng Rappang Nomor 48 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi, dan Uraian Tugas, dan Tata Kerja Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi Kabupaten Sidenreng Rappang	➤ Jumlah Aparatur Pembina Koperasi, UKM, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi baik secara kuantitatif maupun secara kualitatif relatif masih sangat minim.
➤ Adanya komitmen dan motivasi kerja yang tinggi, di kalangan aparatur dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Pembinaan dan Pengembangan Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan.	➤ Sarana Prasarana Kerja dalam rangka pembinaan Koperasi, UKM, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi, relatif masih kurang memadai.

Matriks Eksternal Strategi Faktor Analisis Sistem

Peluang (O)	Ancaman (T)
<ul style="list-style-type: none"> ➤ Adanya Komitmen yang kuat dari Pemerintah Pusat dan Daerah untuk memberikan stimulus bagi pelaku UMKM dalam menghadapi krisis ekonomi akibat konflik antar negara; ➤ Adanya komitmen yang kuat dari Pimpinan Daerah dalam menekan tingkat pengangguran ➤ Masih luasnya lahan untuk dijadikan daerah transmigrasi. ➤ Adanya struktur masyarakat yang memiliki jiwa kewirausahaan serta budaya kerja yang ulet dan religius (Megetteppa na malempu). 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Ancaman krisis ekonomi global akibat konflik domestik di sejumlah belahan dunia yang berdampak pada perlambatan pertumbuhan ekonomi nasional ➤ Terbatasnya daya serap Koperasi dan UMKM memanfaatkan dana Kredit Usaha Rakyat (KUR)

II.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD.

Review terhadap rancangan awal RKPD sangat dibutuhkan dalam merumuskan perencanaan baik pemerintahan, pembangunan maupun pembinaan kemasyarakatan. Hal ini bertujuan untuk mewujudkan program dan kegiatan yang matang dan tentunya bermamfaat dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Dalam Sistem Perencanaan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan Kemasyarakatan dikenal dengan adanya Perencanaan sebagai berikut :

1. Perencanaan dari bawah ke atas (bottom up planning) artinya memungkinkan menggali ide-ide dan gagasan masyarakat sangat dibutuhkan dalam perencanaan. Sistem perencanaan dengan metode tersebut dilaksanakan melalui forum musyawarah perencanaan pembangunan ditingkat desa/kelurahan dan kecamatan.
2. Perencanaan metode dari atas kebawah (top down planning) untuk memungkinkan terjadinya perpaduan antara perumusan Kebijakan Pemerintah dan Keinginan Masyarakat dalam Pelaksanaan Pembangunan di Indonesia pada umumnya dan khususnya di Kabupaten Sidenreng Rappang. Dengan terjadinya proses tersebut, maka kita membandingkan antara Rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan masyarakat, dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel T.C31
REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD TAHUN 2026
KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	DINAS KOPERASI, UKM, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI				15.786.804.000	DINAS KOPERASI, UKM, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI				16.359.404.000	
1	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	Sidrap	Persentase peningkatan koperasi yang berkualitas	7.5	50.000.000	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	Sidrap	Persentase peningkatan koperasi yang berkualitas	7.5	50.000.000	
2	Kegiatan Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Sidrap	Persentase koperasi yang diawasi	78	50.000.000	Kegiatan Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Sidrap	Persentase koperasi yang diawasi	78	50.000.000	

3	Pelaksanaan Proses Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota	Sidr ap	Jumlah Koperasi yang Telah Dilakukan Pengawasan Kekuatan, Kesehatan, Kemandirian, Ketangguhan, serta Akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	30	50.000.000	Pelaksanaan Proses Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota	Sidr ap	Jumlah Koperasi yang Telah Dilakukan Pengawasan Kekuatan, Kesehatan, Kemandirian, Ketangguhan, serta Akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	30	50.000.000
4	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	Sidr ap	Persentase koperasi aktif	68.5	30.000.000	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	Sidr ap	Persentase koperasi aktif	68.5	50.000.000
5	Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Kegiatan Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Sidr ap	Persentase anggota koperasi yang dilatih	6.69	30.000.000	Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Kegiatan Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Sidr ap	Persentase anggota koperasi yang dilatih	6.69	50.000.000
6	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Sub keg Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	Sidr ap	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian	20	30.000.000	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Sub keg Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	Sidr ap	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian	50	50.000.000

7	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	Sidr ap	Meningkatnya Koperasi Yang Berkualitas	23.20	25.000.000	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	Sidr ap	Meningkatnya Koperasi Yang Berkualitas	23.20	25.000.000	
8	Kegiatan Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Sidr ap	Persentase Koperasi Yang Diberikan Dukungan Fasilitas Pendampingan Kelembagaan Dan Usaha Untuk Koperasi Dengan Wilayah Keanggotaan Dalam Daerah Kab.	75	25.000.000	Kegiatan Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Sidr ap	Persentase Koperasi Yang Diberikan Dukungan Fasilitas Pendampingan Kelembagaan Dan Usaha Untuk Koperasi Dengan Wilayah Keanggotaan Dalam Daerah Kab.	75	25.000.000	
9	Sub kegiatan Pembinaan dan Pendampingan Bagi Keluarga dan Kelompok Masyarakat yang Akan Membentuk Koperasi Dalam Pengembangan Ekonomi	Sidr ap	Pembinaan dan atau pendampingan yang dilaksanakan	106	5.000.000	Sub kegiatan Pembinaan dan Pendampingan Bagi Keluarga dan Kelompok Masyarakat yang Akan Membentuk Koperasi Dalam Pengembangan Ekonomi	Sidr ap	Pembinaan dan atau pendampingan yang dilaksanakan	106	5.000.000	
10	Sub kegiatan Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, PenataanManajem	Sidr ap	Jumlah unit usaha yg produktif, bernilai tambah, memiliki akses pasar, akses pembiayaan, penguatan	25	5.000.000	Sub kegiatan Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, PenataanManajem	Sidr ap	Jumlah unit usaha yg produktif, bernilai tambah, memiliki akses pasar, akses pembiayaan, penguatan	25	5.000.000	

	en, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha		kelembagaan, penataan maajemen, standarisasi dan restrukturisasi usaha			en, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha		kelembagaan, penataan maajemen, standarisasi dan restrukturisasi usaha			
1 1	Sub kegiatan Pemberdayaan Koperasi dengan Keanggotaan Daerah Kabupaten/Kota	Sidrap	Koperasi dengan keanggotaan daerah kab/kota	10	15.000.000	Sub kegiatan Pemberdayaan Koperasi dengan Keanggotaan Daerah Kabupaten/Kota	Sidrap	Koperasi dengan keanggotaan daerah kab/kota	10	15.000.000	
1 2	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Sidrap	Persentase usaha mikro yang menjadi wirausaha	20	55.000.000	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Sidrap	Persentase usaha mikro yang menjadi wirausaha	20	175.000.000	
1 3	Kegiatan Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	Sidrap	Persentase usaha mikro yang diberdayakan	2	55.000.000	Kegiatan Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	Sidrap	Persentase usaha mikro yang diberdayakan	2	175.000.000	
1 4	Sub keg Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Sidrap	Jumlah Unit Usaha yang Telah Menerima Pembinaan dan	300	20.000.000	Sub keg Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Sidrap	Jumlah Unit Usaha yang Telah Menerima Pembinaan dan	300	140.000.000	

			Pendampingan Terhadap Usaha Mikro					Pendampingan Terhadap Usaha Mikro			
15	Sub keg Penyusunan Basis Data Usaha Mikro	Sidr ap	Jumlah unit usaha mikro terdata	200	20.000.000	Sub keg Penyusunan Basis Data Usaha Mikro	Sidr ap	Jumlah unit usaha mikro terdata	200	20.000.000	
16	Sub keg Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UMKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UMKM dan Kewirausahaan melalui Pendidikan dan Pelatihan	Sidr ap	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Usaha Mikro dan Kewirausahaan	50	15.000.000	Sub keg Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UMKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UMKM dan Kewirausahaan melalui Pendidikan dan Pelatihan	Sidr ap	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Usaha Mikro dan Kewirausahaan	50	15.000.000	
17	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	Sidr ap	Persentase usaha mikro yang meningkat volume usahanya setelah difasilitasi pengembangan	3.5	5.000.000	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	Sidr ap	Persentase usaha mikro yang meningkat volume usahanya setelah difasilitasi pengembangan	3.5	50.000.000	
18	Kegiatan Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	Sidr ap	Persentase usaha mikro yang difasilitasi pengembangan	2.5	5.000.000	Kegiatan Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	Sidr ap	Persentase usaha mikro yang difasilitasi pengembangan	2.5	50.000.000	

19	Sub keg Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi	Sidrap	Jumlah Unit Usaha Mikro yang Terfasilitasi dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi	20	5.000.000	Sub keg Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi	Sidrap	Jumlah Unit Usaha Mikro yang Terfasilitasi dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi	30	50.000.000
20	PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA	Sidrap	Persentase Kegiatan Yang Dilaksanakan Yang Mengacu Ke Rencana Tenaga Kerja	100	50.000.000	PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA	Sidrap	Persentase Kegiatan Yang Dilaksanakan Yang Mengacu Ke Rencana Tenaga Kerja	100	50.000.000
21	Kegiatan Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)	Sidrap	Dokumen perencanaan tenaga kerja kabupaten	ada	50.000.000	Kegiatan Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)	Sidrap	Dokumen perencanaan tenaga kerja kabupaten	ada	50.000.000
22	Sub kegiatan Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro	Sidrap	Jumlah dokumen tenaga kerja makro	1	50.000.000	Sub kegiatan Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro	Sidrap	Jumlah dokumen tenaga kerja makro	1	50.000.000
23	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Sidrap	Persentase tenaga kerja bersertifikat kompetensi	32	10.075.000.000	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Sidrap	Persentase tenaga kerja bersertifikat kompetensi	32	10.075.000.000
24	Kegiatan Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	Sidrap	Persentase pelaksanaan pelatihan	51	10.075.000.000	Kegiatan Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	Sidrap	Persentase pelaksanaan pelatihan	51	10.075.000.000

25	Sub keg Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	Sidr ap	Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun n	790	10.000.000.000	Sub keg Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	Sidr ap	Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun n	790	10.000.000.000	
26	Sub Keg. Pengadaan Sarana Pelatihan Kerja Kabupaten/Kota	Sidr ap	Jumlah Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana Pelatihan Kerja	2	75.000.000	Sub Keg. Pengadaan Sarana Pelatihan Kerja Kabupaten/Kota	Sidr ap	Jumlah Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana Pelatihan Kerja	2	75.000.000	
27	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Sidr ap	Persentase Tenaga Kerja Yang Ditempatkan (Dalam Dan Luar Negeri) Melalui Mekanisme Layanan Antar Kerja Dalam Wilayah Kab.	18	40.000.000	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Sidr ap	Persentase Tenaga Kerja Yang Ditempatkan (Dalam Dan Luar Negeri) Melalui Mekanisme Layanan Antar Kerja Dalam Wilayah Kab.	18	290.000.000	
28	Kegiatan Pelayanan antar kerja di wilayah Kabupaten/Kota	Sidr ap	Jumlah Lowongan Kerja Yang Tersedia Di Wilayah Kab.	50	5.000.000	Kegiatan Pelayanan antar kerja di wilayah Kabupaten/Kota	Sidr ap	Jumlah Lowongan Kerja Yang Tersedia Di Wilayah Kab.	50	255.000.000	
29	Sub kegiatan Perluasan Kesempatan Kerja	Sidr ap	Jumlah tenaga kerja yang diberdayakan melalui program perluasan kesempatan kerja	20	5.000.000	Sub kegiatan Perluasan Kesempatan Kerja	Sidr ap	Jumlah tenaga kerja yang diberdayakan melalui program perluasan kesempatan kerja	20	255.000.000	

30	Kegiatan Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	Sidrap	Jumlah penempatan tenaga kerja melalui pasar kerja online	35	5.000.000	Kegiatan Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	Sidrap	Jumlah penempatan tenaga kerja melalui pasar kerja online	35	5.000.000
31	Sub kegiatan Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online	Sidrap	Jumlah pencari dan pemberi kerja yang terdaftar dalam pasar kerja melalui sistem online (Karir Hub)	50	5.000.000	Sub kegiatan Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online	Sidrap	Jumlah pencari dan pemberi kerja yang terdaftar dalam pasar kerja melalui sistem online (Karir Hub)	50	5.000.000
32	Kegiatan Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota	Sidrap	Jumlah layanan terpadu satu atap (LTSA) yang dibantukan	1	30.000.000	Kegiatan Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota	Sidrap	Jumlah layanan terpadu satu atap (LTSA) yang dibantukan	1	30.000.000
33	Sub kegiatan Penyediaan Layanan Terpadu pada Calon Pekerja Migran	Sidrap	Jumlah CPMI yang terlayani sesuai prosedur dalam LTSA dan PMI bermasalah yang ditangani	10	30.000.000	Sub kegiatan Penyediaan Layanan Terpadu pada Calon Pekerja Migran	Sidrap	Jumlah CPMI yang terlayani sesuai prosedur dalam LTSA dan PMI bermasalah yang ditangani	10	30.000.000
34	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	Sidrap	Persentase perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB,	17.00	2.025.000.000	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	Sidrap	Persentase perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB,	17.00	2.025.000.000

			LKS Bipartit, Struktur Skala Upah , dan terdaftar BPJS Ketenagakerjaan)					LKS Bipartit, Struktur Skala Upah , dan terdaftar BPJS Ketenagakerjaan)			
35	Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang Hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Sidrap	Besaran pemeriksaan perusahaan	13.63	25.000.000	Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang Hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Sidrap	Besaran pemeriksaan perusahaan	13.63	25.000.000	
36	Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan	Sidrap	Jumlah Data dan Informasi Sarana HI (PP/PKB, Struktur Skala Upah, dan LKS Bipartit) dan Pekerja yang Terdaftar sebagai Peserta Peserta Jamsostek serta Pengupahan	20	25.000.000	Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan	Sidrap	Jumlah Data dan Informasi Sarana HI (PP/PKB, Struktur Skala Upah, dan LKS Bipartit) dan Pekerja yang Terdaftar sebagai Peserta Peserta Jamsostek serta Pengupahan	20	25.000.000	
37	Kegiatan Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan	Sidrap	Besaran Pekerja/Buruh Yang Menjadi Peserta Program Jamsostek	22	2.000.000.000	Kegiatan Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan	Sidrap	Besaran Pekerja/Buruh Yang Menjadi Peserta Program Jamsostek	22	2.000.000.000	

	Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota					Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota					
38	Sub keg Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	Sidrap	Terlaksananya Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	10	2.000.000,00	Sub keg Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	Sidrap	Terlaksananya Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	10	2.000.000,00	
39	PROGRAM PERENCANAAN KAWASAN TRANSMIGRASI	Sidrap	Persentase perencanaan kawasan transmigrasi	13	50.000.000	PROGRAM PERENCANAAN KAWASAN TRANSMIGRASI	Sidrap	Persentase perencanaan kawasan transmigrasi	13	100.000.000	
40	Kegiatan Perencanaan Kawasan Transmigrasi	Sidrap	Jumlah dokumen perencanaan untuk kawasan transmigrasi	3	50.000.000	Kegiatan Perencanaan Kawasan Transmigrasi	Sidrap	Jumlah dokumen perencanaan untuk kawasan transmigrasi	3	100.000.000	
41	Sub kegiatan Identifikasi Potensi Kawasan Transmigrasi	Sidrap	Jumlah dokumen hasil identifikasi potensi kawasan transmigrasi yang bisa dibangun dan dikerjasamakan dengan daerah lain	1	50.000.000	Sub kegiatan Identifikasi Potensi Kawasan Transmigrasi	Sidrap	Jumlah dokumen hasil identifikasi potensi kawasan transmigrasi yang bisa dibangun dan dikerjasamakan dengan daerah lain	2	100.000.000	
42	PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI	Sidrap	Persentase fasilitasi pembangunan kawasan	100	5.000.000	PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI	Sidrap	Persentase fasilitasi pembangunan kawasan	100	5.000.000	

			transmigrasi					transmigrasi			
4 3	Kegiatan Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Sidrap	Jumlah KK yang difasilitasi penempatannya	50	5.000.000	Kegiatan Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Sidrap	Jumlah KK yang difasilitasi penempatannya	50	5.000.000	
4 4	Sub kegiatan Pemindahan dan Penempatan Transmigran yang Berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Sidrap	Jumlah transmigran yang dipindahkan dan ditempatkan	50	5.000.000	Sub kegiatan Pemindahan dan Penempatan Transmigran yang Berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Sidrap	Jumlah transmigran yang dipindahkan dan ditempatkan	50	5.000.000	
4 5	PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI	Sidrap	Persentase kawasan transmigrasi yg dikembangkan	100	20.000.000	PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI	Sidrap	Persentase kawasan transmigrasi yg dikembangkan	100	20.000.000	
4 6	Kegiatan Pengembangan Satuan Permukiman pada Tahap Kemandirian	Sidrap	Jumlah Satuan Permukiman yang dibina	4	20.000.000	Kegiatan Pengembangan Satuan Permukiman pada Tahap Kemandirian	Sidrap	Jumlah Satuan Permukiman yang dibina	4	20.000.000	
4 7	Sub keg Penguatan SDM dalam rangka Kemandirian Satuan Permukiman	Sidrap	Jumlah Kepala Keluarga Transmigran yang Dibina	20	10.000.000	Sub keg Penguatan SDM dalam rangka Kemandirian Satuan Permukiman	Sidrap	Jumlah Kepala Keluarga Transmigran yang Dibina	20	10.000.000	
4 8	Sub kegiatan Penguatan Infrastruktur Sosial, Ekonomi	Sidrap	Jumlah Satuan Permukiman yang Dikembangkan	1	10.000.000	Sub kegiatan Penguatan Infrastruktur Sosial, Ekonomi	Sidrap	Jumlah Satuan Permukiman yang Dikembangkan	1	10.000.000	

	dan Kelembagaan dalam rangka Kemandirian Satuan Pemukiman		n dalam rangka Penguatan Infrastruktur Sosial, Ekonomi dan Kelembagaan			dan Kelembagaan dalam rangka Kemandirian Satuan Pemukiman		n dalam rangka Penguatan Infrastruktur Sosial, Ekonomi dan Kelembagaan			
49	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Sidrap	Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100	3.356.804.000	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Sidrap	Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100	3.444.404.000	
50	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Sidrap	Cakupan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100	14.000.000	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Sidrap	Cakupan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100	14.000.000	
51	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Sidrap	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3	7.000.000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Sidrap	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3	7.000.000	
52	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Sidrap	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3	7.000.000	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Sidrap	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3	7.000.000	

53	Kegiatan: Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Sidrap	Cakupan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100	2.965.224.00 0	Kegiatan: Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Sidrap	Cakupan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100	2.965.224.00 0	
54	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Sidrap	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	462	2.955.224.00 0	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Sidrap	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	462	2.955.224.00 0	
55	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Sidrap	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	175	5.000.000	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Sidrap	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	175	5.000.000	
56	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Sidrap	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	17	5.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Sidrap	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	17	5.000.000	

57	Kegiatan: Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Sidrap	Cakupan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100	10.000.000	Kegiatan: Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Sidrap	Cakupan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100	10.000.000	
58	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Sidrap	Jumlah Dokumen hasil koordinasi dan pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	28	5.000.000	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Sidrap	Jumlah Dokumen hasil koordinasi dan pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	28	5.000.000	
59	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Sidrap	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	28	5.000.000	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Sidrap	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	28	5.000.000	
60	Kegiatan: Administrasi Umum Perangkat Daerah	Sidrap	Cakupan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100	106.000.000	Kegiatan: Administrasi Umum Perangkat Daerah	Sidrap	Cakupan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100	106.000.000	
61	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Sidrap	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	10	1.500.000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Sidrap	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	10	1.500.000	
62	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Sidrap	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	398	5.000.000	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Sidrap	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	398	5.000.000	

63	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Sidrap	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	45	99.500.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Sidrap	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	45	99.500.000	
64	Kegiatan: Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Sidrap	Cakupan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100	25.000.000	Kegiatan: Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Sidrap	Cakupan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100	25.000.000	
65	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Sidrap	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	2	20.000.000	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Sidrap	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	2	20.000.000	
66	Pengadaan Mebel	Sidrap	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	3	5.000.000	Pengadaan Mebel	Sidrap	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	3	5.000.000	
67	Kegiatan: Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan	Sidrap	Cakupan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan	100	152.400.000	Kegiatan: Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan	Sidrap	Cakupan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan	100	240.000.000	
68	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Sidrap	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	50.400.000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Sidrap	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	72.000.000	

6 9	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Sidr ap	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	102.000.000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Sidr ap	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	168.000.000	
7 0	Kegiatan: Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Sidr ap	Cakupan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100	84.180.000	Kegiatan: Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Sidr ap	Cakupan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100	84.180.000	
7 1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Sidr ap	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	12	69.180.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Sidr ap	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	12	69.180.000	
7 2	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Sidr ap	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	11	5.000.000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Sidr ap	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	11	5.000.000	
7 3	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Sidr ap	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	1	10.000.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Sidr ap	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	1	10.000.000	

II.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Dalam Sistem Perencanaan Pembangunan dikenal dua arah, yaitu Top Down Planning dan Bottom Up Planning, kedua Sistem tersebut sering digunakan dalam perencanaan pembangunan di Indonesia pada umumnya dan khususnya di Kabupaten Sidenreng Rappang. Hal ini dimaksudkan agar terjadi perpaduan antara perumusan Kebijakan Pemerintah dan keinginan Masyarakat dalam Pelaksanaan Pembangunan, Pemerintahan dan Pembinaan Kemasyarakatan untuk saling bersinergi satu dengan lainnya.

Dalam pelaksanaannya dilakukan setiap tahun sebagai penjabaran Pembangunan Lima Tahunan dan mulai dilakukan pada tingkat Desa/Kelurahan melalui Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang Tingkat Desa/Kelurahan) yang melibatkan Stakeholders, kemudian ditindaklanjuti pada tingkat kecamatan. Musrenbang tersebut kemudian dirumuskan pada tingkat Kabupaten sebagai Program Unit Kerja SKPD Tahunan, Pelaksanaan Musrenbang baik tingkat Desa/Kelurahan dan tingkat Kecamatan dimaksudkan menampung aspirasi masyarakat sebagai pencerminan azas keadilan dan pemerataan, agar masyarakat dapat menikmati hasil-hasil pembangunan disegala aspek secara berkesinambungan (sustainable).

Usulan Program masyarakat Desa/Kelurahan dapat kita tampung pada tingkat SKPD. Tidak semua usulan program masyarakat dapat diterima oleh karena tidak sejalan apa yang kita programkan dan terbatasnya anggaran Pemerintah Kabupaten, yang dialokasikan pada Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi Kabupaten Sidenreng Rappang, dengan keterbatasan dana tersebut.

Tabel II. 4
USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN DARI PARA PEMANGKU KEPENTINGAN TAHUN 2026

NO.	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	VOLUME	PAGU INDIKATIF (Rp)	CATATAN
I.	Program Peningkatan Kesempatan Kerja					
	Sub keg Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi				1.950.000.000	
1	Pelatihan dan pengadaan peralatan Pertukangan	kelurahan Majjelling, Kab. Sidenreng Rappang	Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun n	1 Klp	50.000.000	Hasil Musrembang tahun 2025
2	Pelatihan dan Pengadaan Mesin Jahit	kelurahan majjelling, Kab. Sidenreng Rappang	sda	1 Klp	50.000.000	sda
3	Pelatihan dan Pengadaan Kecantikan	kelurahan majjelling, Kab. Sidenreng Rappang	sda	1 Klp	50.000.000	sda
4	Pelatihan dan Pengadaan Kecantikan	kelurahan majjelling, Kab. Sidenreng Rappang	sda	1 Klp	50.000.000	sda
5	Pelatihan dan Pengadaan Kecantikan	kelurahan majjelling, Kab. Sidenreng Rappang	sda	1 Klp	50.000.000	sda
6	Pelatihan dan Pengadaan Kecantikan	kelurahan majjelling, Kab. Sidenreng Rappang	sda	1 Klp	50.000.000	sda

1	Pengadaan Mesin Jahit Kelompok Terkini	Lingkungan Panreng Rijang Kelurahan Panreng Kecamatan Baranti Kab. Sidrap, Kab. Sidenreng Rappang	Jumlah Unit Usaha Mikro yang Terfasilitasi dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi	1 paket	10.000.000	Hasil Musrembang tahun 2026
2	Pengadaan Masin Jahit Kelompok Mawar	Lingkungan Panreng Rijang Kelurahan Panreng Kecamatan Baranti Kab. Sidrap, Kab. Sidenreng Rappang	sda	1 paket	10.000.000	sda
3	Pengadaan mesin kemasan	Desa Mario, Kab. Sidenreng Rappang	sda	1 paket	10.000.000	sda
4	Pengadaan mesin jahit	kelurahan batu, Kab. Sidenreng Rappang	sda	1 paket	10.000.000	sda
5	Pengadaan alat pertukangan kayu	keluraha batu, Kab. Sidenreng Rappang	sda	1 paket	10.000.000	sda
6	Pengadaan mesin jahit	Desa Lainungan, Kab. Sidenreng Rappang	sda	1 paket	10.000.000	sda
7	Pengadaan peralatan usaha	DUSUN I KUNDALA DAN DUSUN II LARUA , Kab. Sidenreng Rappang	sda	1 paket	10.000.000	sda
8	Pengadaan peralatan Tata Boga	Lingkungan I dan Lingkungan II, Kab. Sidenreng Rappang	sda	1 paket	10.000.000	sda
9	Pengadaan peralatan usaha	DESA LEPPANGENG, Kab. Sidenreng Rappang	sda	1 paket	10.000.000	sda
10	Pengadaan peralatan usaha	DESA LEPPANGENG, Kab. Sidenreng Rappang	sda	1 paket	10.000.000	sda
11	Pengadaan peralatan usaha	DUSUN I Jambu-Jambu, Kab. Sidenreng Rappang	sda	1 paket	10.000.000	sda

12	Pengadaan peralatan usaha	Buntu Buangin, Kab. Sidenreng Rappang	sda	3 paket	30.000.000	sda
13	Pengadaan peralatan pertukangan kayu	LINGKUNGAN BENTENG, Kab. Sidenreng Rappang	sda	1 paket	10.000.000	sda
14	Pengadaan mesin jahit	Kel. Rappang Kec. Panca rijang, Kab. Sidenreng Rappang	sda	1 paket	10.000.000	
15	Pengadaan peralatan usaha	Desa Lise, Kab. Sidenreng Rappang	sda	1 paket	10.000.000	sda
16	Pengadaan peralatan Tata Boga	Desa Maddenre, Desa Kulo Kec Kulo, Kab. Sidenreng Rappang	sda	2 paket	20.000.000	sda
17	Pengadaan peralatan perbengkelan	Desa Kulo, Desa Maddenra, Desa Abbokongan Kec. Kulo, Kab. Sidenreng Rappang	sda	3 paket	30.000.000	sda
18	Pengadaan peralatan pertukangan	Desa Kulo, Abbkongon, Maddenra Kec. Kulo, Kab. Sidenreng Rappang	sda	3 paket	30.000.000	sda
19	Pengadaan tenda	Desa Mattirotasi, Kab. Sidenreng Rappang	sda	1 paket	15.000.000	sda
20	Pengadaan peralatan usaha	KECAMATAN MARITENGGAE DAN KECAMATAN WATANG SIDENRENG, Kab. Sidenreng Rappang	sda	10 paket	100.000.000	sda
21	Pengadaan peralatan usaha	Tersebar di dua kecamatan (Maritengngae dan Watang Sidenreng, Kab. Sidenreng Rappang	sda	10 paket	100.000.000	sda
22	Pengadaan peralatan usaha	Kecamatan Baranti, Kulo dan Panca Rijang, Kab. Sidenreng Rappang	sda	10 paket	100.000.000	sda
23	Pengadaan peralatan usaha	Kecamatan Dua Pitue, Kab. Sidenreng Rappang	sda	1 paket	15.000.000	sda
24	Pengadaan peralatan usaha	TERSEBAR DI 3 KECAMATAN TELLU LIMPOE, PANCA LAUTANG, WATTANG PULU, Kab. Sidenreng	sda	20 paket	150.000.000	sda

		Rappang				
25	Pengadaan Gurinda	Lingkungan 2 Kel. pajelele, Kab. Sidenreng Rappang	sda	200 uint	150.000.000	sda
26	Pengadaan mesin jahit	Lingkungan 2 Kel. pajelele, Kab. Sidenreng Rappang	sda	10 unit	50.000.000	sda
27	Pengadaan peralatan pertukangan	Kelurahan Massepe dan Kelurahan Pajelele, Kab. Sidenreng Rappang	sda	20 paket	20.000.000	sda
28	Pengadaan peralatan usaha	KECAMATAN PANCA RIJANG DAN KECAMATAN BARANTI, Kab. Sidenreng Rappang	sda	20 paket	150.000.000	sda
29	Pengadaan peralatan usaha	KECAMATAN PITURIASE, KECAMATAN PITURIAWA, KECAMATAN DUAPITTUE , Kab. Sidenreng Rappang	sda	20 paket	150.000.000	sda
30	Pengadaan peralatan usaha	Tersebar 3 kecamatan (Baranti, Panca rijang dan Kulo), Kab. Sidenreng Rappang	sda	10 paket	100.000.000	sda
31	Pengadaan peralatan usaha	Kecamatan Panca Rijang, Kulo, dan Baranti, Kab. Sidenreng Rappang	sda	10 paket	50.000.000	sda
32	Pengadaan peralatan usaha	kecamatan Kulo, Panca Rijang, dan Kulo, Kab. Sidenreng Rappang	sda	10 paket	100.000.000	sda
33	Pengadaan peralatan usaha	tersebar Kecamatan Maritengngae dan Watang Sidenreng, Kab. Sidenreng Rappang	sda	10 paket	100.000.000	sda
34	Pengadaan peralatan usaha	tersebar Kecamatan Maritengngae dan Watang Sidenreng, Kab. Sidenreng Rappang	sda	20 unit	50.000.000	sda

III.	Program Perberdayaan UMKM					
	Sub keg Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Usaha Mikro serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Usaha Mikro dan Kewirausahaan				440.000.000	
1	Pelatihan wirausaha	Lingkungan I dan II Lawawoi, Kab. Sidenreng Rappang	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Usaha Mikro dan Kewirausahaan	2 klp	20.000.000	Hasil Musrembang tahun 2025
2	Pelatihan wirausaha	Desa Dengeng-Dengeng, Kab. Sidenreng Rappang		2 klp	20.000.000	sda
3	Pelatihan wirausaha	Dusun I Mamminasae, Kab. Sidenreng Rappang	sda	2 klp	20.000.000	sda
4	Pelatihan wirausaha	Dusun II Sudedo, Kab. Sidenreng Rappang	sda	2 klp	20.000.000	sda
5	Pelatihan wirausaha	Desa Lagading, Kab. Sidenreng Rappang	sda	3 klp	30.000.000	sda
6	Pelatihan Peningkatan Kapasitas UMKM	UMKM Mawar, Kelurahan Lancirang, Kecamatan Pitu Riawa, Kab. Sidenreng Rappang	sda	3 klp	45.000.000	sda
7	Pelatihan Peningkatan Kapasitas UMKM	UMKM Padaidi, Kelurahan Lancirang, Kecamatan Pitu Riawa, Kab. Sidenreng Rappang		3 klp	45.000.000	sda
8	Pelatihan Peningkatan Kapasitas UMKM	Kecamatan Pitu Riawa, Kab. Sidenreng Rappang		5 klp	50.000.000	sda
9	Pelatihan Peningkatan Kapasitas UMKM	TERSEBAR DI MARITENGGAE - WATANG SIDENRENG, Kab. Sidenreng Rappang		100 org	100.000.000	sda

10	Pelatihan Peningkatan Kapasitas UMKM	TERSEBAR DI PANCA RIJANG, BARANTI, KULO, Kab. Sidenreng Rappang		30 org	30.000.000	sda
11	Pelatihan Peningkatan Kapasitas UMKM	TERSEBAR DI PANCA RIJANG, BARANTI, KULO, Kab. Sidenreng Rappang		30 org	30.000.000	sda
12	Pelatihan Peningkatan Kapasitas UMKM	TERSEBAR DI WATANG PULU, PANCA LAUTANG DAN TELLU LIMPOE, Kab. Sidenreng Rappang		30 org	30.000.000	sda
	Program pembangunan wilayah transmigrasi				11.100.000.000	
1	Penyiapan Lingkungan Hunian Fisik, Sosial, Ekonomi bagi Penduduk Setempat dan Transmigran	Kec. Pitu Riase	Jumlah Pelaporan Kelayakan Lingkungan dan Permukiman Transmigrasi (yang Memenuhi Kriteria Layak Huni, Layak Usaha dan Layak Berkembang)	1 paket	100.000.000	Hasil Musrebang tahun 2025
	Peningkatan ruas jalan existing transmigrasi lampiring - transmigrasi tanatoro	Kelurahan Batu dan Desa Tanatoro, Kab. Sidenreng Rappang		7 km	11.000.000.000	
	Program pengembangan wilayah transmigrasi					
2	Sub keg Penguatan Infrastruktur Sosial, Ekonomi dan Kelembagaan dalam rangka Kemandirian Satuan Pemukiman				1.125.000.000	

	Bantuan Sarana Sosial Ekonomi Pada Kawasan Transmigrasi	Dusun III & IV Desa Lagading, Kab. Sidenreng Rappang	Jumlah Satuan Permukiman yang Dikembangkan dalam rangka Penguatan Infrastruktur Sosial, Ekonomi dan Kelembagaan	45 paket	1.125.000.000	Hasil Musrembang tahun 2024
--	---	--	---	----------	---------------	-----------------------------

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

III.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Pembangunan Nasional Lima Tahun (Jangka Menengah) merupakan bentuk kebijakan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat, kemudian dijabarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), dalam pelaksanaannya dilakukan dua tahapan, yaitu APBN Awal dan APBN Perubahan. Dalam setiap penetapan APBN telah tertuang didalamnya berbagai Program lintas sektoral. Kementerian Koperasi dan UKM Republik Indonesia telah memproyeksikan program serta mengakomodir usulan-usulan dari Daerah kemudian dirumuskan menjadi Program Nasional melalui Rakornas yang dilaksanakan setiap tahun.

Tema pembangunan daerah Kabupaten Sidenreng Rappang tahun 2026 adalah "Mewujudkan Ketahanan Pangan Berkelanjutan Melalui Penguatan Agrobisnis untuk Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Inklusif".

III.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Tujuan Renja Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi yang merupakan penjabaran Renstra Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi Kabupaten Sidenreng Rappang untuk melaksanakan penganggaran secara efektif, efisien dan terukur sebagai wujud pelaksanaan perencanaan, serta menitikberatkan pada pengembangan pelaku usaha mikro kecil menengah, koperasi; sehingga dapat memperluas kesempatan kerja dan mencegah peningkatan pengangguran dan pengembangan kawasan transmigrasi demi terwujudnya kesejahteraan yang merata.

a. Tujuan Renja Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi sebagai berikut :

- 1) Meningkatkan daya saing Koperasi dan UMKM
- 2) Memperluas kesempatan kerja dan produktivitas tenaga kerja

- b. Sasaran Renja Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi untuk mendukung percepatan pertumbuhan ekonomi berdasarkan RPD Kabupaten Sidenreng Rappang dan Renstra Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi sebagai berikut:
- 1) Meningkatnya produktivitas koperasi dan UMKM
 - 2) Meningkatnya kompetensi tenaga kerja
 - 3) Meningkatnya pengembangan wilayah transmigrasi untuk perluasan kesempatan kerja.
 - 4) Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah
- c. Indikator Sasaran Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi sebagai berikut :
- 1). Rata-rata produktivitas Koperasi dan UMKM
 - 2). Tingkat produktivitas tenaga kerja.
 - 3). Persentase peningkatan sarana/prasarana di wilayah transmigrasi
 - 4). Nilai sakiip perangkat daerah

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

IV.1. Program dan Kegiatan

Untuk mewujudkan tujuan dan sasaran Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi Kabupaten Sidenreng Rappang maka perlu disusun rencana kerja yang memuat sejumlah program dan kegiatan. Rencana kerja ini tidak terlepas dari rencana strategis yang telah ditetapkan. Sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, maka penyesuaian nomenklatur program dan kegiatan dalam rencana strategis telah dipetakan ke dalam program, kegiatan, dan sub kegiatan sesuai nomenklatur dalam permendagri dimaksud, namun masih terdapat beberapa program dan kegiatan yang belum kami temukan keselarasannya dan telah kami usulkan untuk dibuatkan penetapan terhadap program dan kegiatan tersebut.

Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi Kabupaten Sidenreng Rappang untuk tahun 2026 merencanakan program, kegiatan, dan sub kegiatan sebagai berikut :

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan

NO	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR
1	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	Persentase peningkatan koperasi yang berkualitas
2	Kegiatan Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase koperasi yang diawasi
3	Pelaksanaan Proses Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Koperasi yang Telah Dilakukan Pengawasan Kekuatan, Kesehatan, Kemandirian, Ketangguhan, serta Akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota
4	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	Persentase koperasi aktif
5	Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Kegiatan Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase anggota koperasi yang dilatih
6	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Sub keg Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian

7	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	Meningkatnya Koperasi Yang Berkualitas
8	Kegiatan Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Koperasi Yang Diberikan Dukungan Fasilitasi Pendampingan Kelembagaan Dan Usaha Untuk Koperasi Dengan Wilayah Keanggotaan Dalam Daerah Kab.
9	Sub kegiatan Pembinaan dan Pendampingan Bagi Keluarga dan Kelompok Masyarakat yang Akan Membentuk Koperasi Dalam Pengembangan Ekonomi	Pembinaan dan atau pendampingan yang dilaksanakan
10	Sub kegiatan Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha	Jumlah unit usaha yg produktif, bernilai tambah, memiliki akses pasar, akses pembiayaan, penguatan kelembagaan, penataan manajemen, standarisasi dan restrukturisasi usaha
11	Sub kegiatan Pemberdayaan Koperasi dengan Keanggotaan Daerah Kabupaten/Kota	Koperasi dengan keanggotaan daerah kab/kota
12	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Persentase usaha mikro yang menjadi wirausaha
13	Kegiatan Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	Persentase usaha mikro yang diberdayakan
14	Sub keg Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Jumlah Unit Usaha yang Telah Menerima Pembinaan dan Pendampingan Terhadap Usaha Mikro
15	Sub keg Penyusunan Basis Data Usaha Mikro	Jumlah unit usaha mikro terdata
16	Sub keg Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UMKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UMKM dan Kewirausahaan melalui Pendidikan dan Pelatihan	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Usaha Mikro dan Kewirausahaan
17	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	Persentase usaha mikro yang meningkat volume usahanya setelah difasilitasi pengembangan
18	Kegiatan Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	Persentase usaha mikro yang difasilitasi pengembangan
19	Sub keg Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi	Jumlah Unit Usaha Mikro yang Terfasilitasi dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi
20	PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA	Persentase Kegiatan Yang Dilaksanakan Yang Mengacu Ke Rencana Tenaga Kerja
21	Kegiatan Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)	Dokumen perencanaan tenaga kerja kabupaten
22	Sub kegiatan Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro	Jumlah dokumen tenaga kerja makro
23	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Persentase tenaga kerja bersertifikat kompetensi
24	Kegiatan Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	Persentase pelaksanaan pelatihan
25	Sub keg Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun n

26	Sub Keg. Pengadaan Sarana Pelatihan Kerja Kabupaten/Kota	Jumlah Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana Pelatihan Kerja
27	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Persentase Tenaga Kerja Yang Ditempatkan (Dalam Dan Luar Negeri) Melalui Mekanisme Layanan Antar Kerja Dalam Wilayah Kab.
28	Kegiatan Pelayanan antar kerja di wilayah Kabupaten/Kota	Jumlah Lowongan Kerja Yang Tersedia Di Wilayah Kab.
29	Sub kegiatan Perluasan Kesempatan Kerja	Jumlah tenaga kerja yang diberdayakan melalui program perluasan kesempatan kerja
30	Kegiatan Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	Jumlah penempatan tenaga kerja melalui pasar kerja online
31	Sub kegiatan Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online	Jumlah pencari dan pemberi kerja yang terdaftar dalam pasar kerja melalui sistem online (Karir Hub)
32	Kegiatan Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah layanan terpadu satu atap (LTSA) yang dibantukan
33	Sub kegiatan Penyediaan Layanan Terpadu pada Calon Pekerja Migran	Jumlah CPMI yang terlayani sesuai prosedur dalam LTSA dan PMI bermasalah yang ditangani
34	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	Persentase perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah , dan terdaftar BPJS Ketenagakerjaan)
35	Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang Hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Besaran pemeriksaan perusahaan
36	Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan	Jumlah Data dan Informasi Sarana HI (PP/PKB, Struktur Skala Upah, dan LKS Bipartit) dan Pekerja yang Terdaftar sebagai Peserta Jamsostek serta Pengupahan
37	Kegiatan Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	Besaran Pekerja/Buruh Yang Menjadi Peserta Program Jamsostek
38	Sub keg Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	Terlaksananya Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja
39	PROGRAM PERENCANAAN KAWASAN TRANSMIGRASI	Persentase perencanaan kawasan transmigrasi
40	Kegiatan Perencanaan Kawasan Transmigrasi	Jumlah dokumen perencanaan untuk kawasan transmigrasi
41	Sub kegiatan Identifikasi Potensi Kawasan Transmigrasi	Jumlah dokumen hasil identifikasi potensi kawasan transmigrasi yang bisa dibangun dan dikerjasamakan dengan daerah lain
42	PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI	Persentase fasilitasi pembangunan kawasan transmigrasi
43	Kegiatan Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah KK yang difasilitasi penempatannya
44	Sub kegiatan Pemindahan dan Penempatan Transmigran yang Berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah transmigran yang dipindahkan dan ditempatkan

45	PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI	Persentase kawasan transmigrasi yg dikembangkan
46	Kegiatan Pengembangan Satuan Permukiman pada Tahap Kemandirian	Jumlah Satuan Permukiman yang dibina
47	Sub keg Penguatan SDM dalam rangka Kemandirian Satuan Permukiman	Jumlah Kepala Keluarga Transmigran yang Dibina
48	Sub kegiatan Penguatan Infrastruktur Sosial, Ekonomi dan Kelembagaan dalam rangka Kemandirian Satuan Permukiman	Jumlah Satuan Permukiman yang Dikembangkan dalam rangka Penguatan Infrastruktur Sosial, Ekonomi dan Kelembagaan
49	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
50	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Cakupan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
51	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
52	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
53	Kegiatan: Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Cakupan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
54	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN
55	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
56	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD
57	Kegiatan: Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Cakupan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
58	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen hasil koordinasi dan pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian
59	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai
60	Kegiatan:Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan Administrasi Umum Perangkat Daerah
61	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan
62	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu
63	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
64	Kegiatan: Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Cakupan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
65	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan
66	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan
67	Kegiatan: Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan	Cakupan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan

68	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan
69	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan
70	Kegiatan: Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
71	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya
72	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara
73	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi

Untuk tahun 2026 ditetapkan program, kegiatan, dan Sub Kegiatan yang akan dilaksanakan. Program, kegiatan, dan sub kegiatan tersebut membutuhkan anggaran sebesar **Rp 16.359.404.000,00**. Program, kegiatan berikut pendanaannya kami sajikan dalam Tabel C29 berikut.

Tabel T-C.33
RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2026
DAN PRA KIRAAN MAJU TAHUN 2027
KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG, PROVINSI SULAWESI SELATAN

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	DINAS KOPERASI, UKM, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI				16.359.404.000				16.591.476.725
1	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	Persentase peningkatan koperasi yang berkualitas	Sidrap	7.5	50.000.000	APBD KAB		7.7	50.000.000
2	Kegiatan Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase koperasi yang diawasi	Sidrap	78	50.000.000	APBD KAB		80	50.000.000

3	Pelaksanaan Proses Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Koperasi yang Telah Dilakukan Pengawasan Kekuatan, Kesehatan, Kemandirian, Ketangguhan, serta Akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Sidrap	30	50.000.000	APBD KAB		30	50.000.000
4	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	Persentase koperasi aktif	Sidrap	68.5	50.000.000	APBD KAB		68.7	50.000.000
5	Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Kegiatan Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase anggota koperasi yang dilatih	Sidrap	6.69	50.000.000	APBD KAB		7	50.000.000
6	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Sub keg Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian	Sidrap	50	50.000.000	APBD KAB		50	50.000.000
7	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	Meningkatnya Koperasi Yang Berkualitas	Sidrap	23.20	25.000.000	APBD KAB		25	25.000.000

8	Kegiatan Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Koperasi Yang Diberikan Dukungan Fasilitas Pendampingan Kelembagaan Dan Usaha Untuk Koperasi Dengan Wilayah Keanggotaan Dalam Daerah Kab.	Sidrap	75	25.000.000	APBD KAB		77	25.000.000
9	Sub kegiatan Pembinaan dan Pendampingan Bagi Keluarga dan Kelompok Masyarakat yang Akan Membentuk Koperasi Dalam Pengembangan Ekonomi	Pembinaan dan atau pendampingan yang dilaksanakan	Sidrap	106	5.000.000	APBD KAB		50	5.000.000
10	Sub kegiatan Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha	Jumlah unit usaha yg produktif, bernilai tambah, memiliki akses pasar, akses pembiayaan, penguatan kelembagaan, penataan manajemen, standarisasi dan restrukturisasi usaha	Sidrap	25	5.000.000	APBD KAB		25	5.000.000
11	Sub kegiatan Pemberdayaan Koperasi dengan Keanggotaan Daerah Kabupaten/Kota	Koperasi dengan keanggotaan daerah kab/kota	Sidrap	10	15.000.000	APBD KAB		10	15.000.000

12	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Persentase usaha mikro yang menjadi wirausaha	Sidrap	20	175.000.000	APBD KAB		22	105.000.000
13	Kegiatan Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	Persentase usaha mikro yang diberdayakan	Sidrap	2	175.000.000	APBD KAB		2.5	105.000.000
14	Sub keg Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Jumlah Unit Usaha yang Telah Menerima Pembinaan dan Pendampingan Terhadap Usaha Mikro	Sidrap	300	140.000.000	APBD KAB		300	70.000.000
15	Sub keg Penyusunan Basis Data Usaha Mikro	Jumlah unit usaha mikro terdata	Sidrap	200	20.000.000	APBD KAB		200	20.000.000

16	Sub keg Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UMKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UMKM dan Kewirausahaan melalui Pendidikan dan Pelatihan	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Usaha Mikro dan Kewirausahaan	Sidrap	50	15.000.000	APBD KAB		50	15.000.000
17	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	Persentase usaha mikro yang meningkat volume usahanya setelah difasilitasi pengembangan	Sidrap	3.5	50.000.000	APBD KAB		4	50.000.000
18	Kegiatan Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	Persentase usaha mikro yang difasilitasi pengembangan	Sidrap	2.5	50.000.000	APBD KAB		2.5	50.000.000
19	Sub keg Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi	Jumlah Unit Usaha Mikro yang Terfasilitasi dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi	Sidrap	20	50.000.000	APBD KAB		20	50.000.000
20	PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA	Persentase Kegiatan Yang Dilaksanakan Yang Mengacu Ke Rencana Tenaga Kerja	Sidrap	100	50.000.000	APBD KAB		100	50.000.000

21	Kegiatan Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)	Dokumen perencanaan tenaga kerja kabupaten	Sidrap	ada	50.000.000	APBD KAB		ada	50.000.000
22	Sub kegiatan Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro	Jumlah dokumen tenaga kerja makro	Sidrap	1	50.000.000	APBD KAB		1	50.000.000
23	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Persentase tenaga kerja bersertifikat kompetensi	Sidrap	32	10.075.000.000	APBD KAB		33	10.075.000.000
24	Kegiatan Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	Persentase pelaksanaan pelatihan	Sidrap	51	10.075.000.000	APBD KAB		52	10.075.000.000
25	Sub keg Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun n	Sidrap	790	10.000.000.000	APBD KAB		800	10.000.000.000
26	Sub Keg. Pengadaan Sarana Pelatihan Kerja Kabupaten/Kota	Jumlah Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana Pelatihan Kerja	Sidrap	2	75.000.000	APBD KAB		10	75.000.000

27	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Persentase Tenaga Kerja Yang Ditempatkan (Dalam Dan Luar Negeri) Melalui Mekanisme Layanan Antar Kerja Dalam Wilayah Kab.	Sidrap	18	290.000.000	APBD KAB		25	535.000.000
28	Kegiatan Pelayanan antar kerja di wilayah Kabupaten/Kota	Jumlah Lowongan Kerja Yang Tersedia Di Wilayah Kab.	Sidrap	50	255.000.000	APBD KAB		70	500.000.000
29	Sub kegiatan Perluasan Kesempatan Kerja	Jumlah tenaga kerja yang diberdayakan melalui program perluasan kesempatan kerja	Sidrap	20	255.000.000	APBD KAB		20	500.000.000
30	Kegiatan Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	Jumlah penempatan tenaga kerja melalui pasar kerja online	Sidrap	35	5.000.000	APBD KAB		50	5.000.000
31	Sub kegiatan Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online	Jumlah pencari dan pemberi kerja yang terdaftar dalam pasar kerja melalui sistem online (Karir Hub)	Sidrap	50	5.000.000	APBD KAB		50	5.000.000

32	Kegiatan Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah layanan terpadu satu atap (LTSA) yang dibantukan	Sidrap	1	30.000.000	APBD KAB		1	30.000.000
33	Sub kegiatan Penyediaan Layanan Terpadu pada Calon Pekerja Migran	Jumlah CPMI yang terlayani sesuai prosedur dalam LTSA dan PMI bermasalah yang ditangani	Sidrap	10	30.000.000	APBD KAB		10	30.000.000
34	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	Persentase perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah , dan terdaftar BPJS Ketenagakerjaan)	Sidrap	17.00	2.025.000.000	APBD KAB		20.0	2.025.000.000
35	Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang Hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Besaran pemeriksaan perusahaan	Sidrap	13.63	25.000.000	APBD KAB		15	25.000.000

36	Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan	Jumlah Data dan Informasi Sarana HI (PP/PKB, Struktur Skala Upah, dan LKS Bipartit) dan Pekerja yang Terdaftar sebagai Peserta Jamsostek serta Pengupahan	Sidrap	20	25.000.000	APBD KAB		20	25.000.000
37	Kegiatan Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	Besaran Pekerja/Buruh Yang Menjadi Peserta Program Jamsostek	Sidrap	22	2.000.000.000	APBD KAB		25	2.000.000.000
38	Sub keg Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	Terlaksananya Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	Sidrap	10	2.000.000.000	APBD KAB		10,328	2.000.000.000
39	PROGRAM PERENCANAAN KAWASAN TRANSMIGRASI	Persentase perencanaan kawasan transmigrasi	Sidrap	13	100.000.000	APBD KAB		15	100.000.000
40	Kegiatan Perencanaan Kawasan Transmigrasi	Jumlah dokumen perencanaan untuk kawasan transmigrasi	Sidrap	3	100.000.000	APBD KAB		4	100.000.000

41	Sub kegiatan Identifikasi Potensi Kawasan Transmigrasi	Jumlah dokumen hasil identifikasi potensi kawasan transmigrasi yang bisa dibangun dan dikerjasamakan dengan daerah lain	Sidrap	3	100.000.000	APBD KAB		4	100.000.000
42	PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI	Persentase fasilitasi pembangunan kawasan transmigrasi	Sidrap	100	5.000.000	APBD KAB		100	5.000.000
43	Kegiatan Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah KK yang difasilitasi penempatannya	Sidrap	50	5.000.000	APBD KAB		70	5.000.000
44	Sub kegiatan Pemindahan dan Penempatan Transmigran yang Berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah transmigran yang dipindahkan dan ditempatkan	Sidrap	50	5.000.000	APBD KAB		70	5.000.000
45	PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI	Persentase kawasan transmigrasi yg dikembangkan	Sidrap	100	20.000.000	APBD KAB		100	20.000.000
46	Kegiatan Pengembangan Satuan Permukiman pada Tahap Kemandirian	Jumlah Satuan Permukiman yang dibina	Sidrap	4	20.000.000	APBD KAB		4	20.000.000

47	Sub keg Penguatan SDM dalam rangka Kemandirian Satuan Pemukiman	Jumlah Kepala Keluarga Transmigran yang Dibina	Sidrap	20	10.000.000	APBD KAB		20	10.000.000
48	Sub kegiatan Penguatan Infrastruktur Sosial, Ekonomi dan Kelembagaan dalam rangka Kemandirian Satuan Pemukiman	Jumlah Satuan Permukiman yang Dikembangkan dalam rangka Penguatan Infrastruktur Sosial, Ekonomi dan Kelembagaan	Sidrap	1	10.000.000	APBD KAB		1	10.000.000
49	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Sidrap	100	3.444.404.000	APBD KAB		100	3.501.476.725
50	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Cakupan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Sidrap	100	14.000.000	APBD KAB		100	14.000.000
51	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Sidrap	3	7.000.000	APBD KAB		3	7.000.000
52	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Sidrap	3	7.000.000	APBD KAB		3	7.000.000

53	Kegiatan: Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Cakupan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Sidrap	100	2.965.224.000	APBD KAB		100	3.022.296.725
54	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Sidrap	462	2.955.224.000	APBD KAB		462	3.012.296.725
55	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Sidrap	175	5.000.000	APBD KAB		175	5.000.000
56	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Sidrap	17	5.000.000	APBD KAB		17	5.000.000
57	Kegiatan: Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Cakupan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Sidrap	100	10.000.000	APBD KAB		100	10.000.000
58	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen hasil koordinasi dan pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Sidrap	28	5.000.000	APBD KAB		28	5.000.000
59	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Sidrap	28	5.000.000	APBD KAB		28	5.000.000

60	Kegiatan:Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Sidrap	100	106.000.000	APBD KAB		100	106.000.000
61	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Sidrap	10	1.500.000	APBD KAB		10	1.500.000
62	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Sidrap	398	5.000.000	APBD KAB		398	5.000.000
63	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Sidrap	45	99.500.000	APBD KAB		45	99.500.000
64	Kegiatan: Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Cakupan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Sidrap	100	25.000.000	APBD KAB		100	25.000.000
65	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Sidrap	2	20.000.000	APBD KAB		2	20.000.000
66	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Sidrap	3	5.000.000	APBD KAB		3	5.000.000
67	Kegiatan: Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan	Cakupan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan	Sidrap	100	240.000.000	APBD KAB	-	100	240.000.000
68	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Sidrap	12	72.000.000	APBD KAB		12	72.000.000

69	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Sidrap	12	168.000.000	APBD KAB		12	168.000.000
70	Kegiatan: Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Sidrap	100	84.180.000	APBD KAB		100	84.180.000
71	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Sidrap	12	69.180.000	APBD KAB		12	69.180.000
72	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Sidrap	11	5.000.000	APBD KAB		11	5.000.000
73	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	Sidrap	1	10.000.000	APBD KAB		1	10.000.000

BAB V

PENUTUP

Rencana Kerja ini disusun berdasarkan Referensi (Undang-Undang/Peraturan), Renstra, dan keterpaduan Top Down Planning (Konsultatif) dan Bottom Up Planning (Definitif) melalui Musrenbang dan Kebutuhan Organisasi sesuai Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi Kabupaten Sidenreng Rappang serta menselaraskan dan mensinergikan Kebijakan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi.

Dalam rangka pengembangan Koperasi, Usaha Mikro Kecil Menengah, ketenagakerjaan, dan transmigrasi di Kabupaten Sidenreng Rappang, maka dalam pelaksanaan program/kegiatan pada Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi perlu mendapat perhatian khusus jika sekiranya ketersediaan anggaran cukup demi untuk pelaksanaan Program/kegiatan tahun 2026.

Demikianlah Rencana Kerja Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi disusun sebagai acuan aparat dalam pelaksanaan Program/Kegiatan untuk mencapai tujuan bersama.

Pangkajene Sidenreng, 15 Agustus 2025

KEPALA DINAS KOPERASI, UKM,
TENAGA KERJA, DAN TRANSMIGRASI
KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG,



Dr. MUH. ROHADY RAMADHAN, S.I.P.M.Si.CGCAE

NIP. 19710318 199101 1 003

